

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memberi dampak yang sangat besar terhadap perkembangan masyarakat. Hal itu juga berpengaruh pada jenis organisasi di sektor ekonomi yang salah satunya adalah organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang dalam operasinya tidak berorientasi untuk menghasilkan laba. Pada umumnya jenis organisasi ini menekankan pada pelayanan publik.

Organisasi nirlaba di Indonesia telah berkembang pesat. Menurut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPMM), entitas nirlaba adalah suatu entitas atau perkumpulan dari beberapa individu yang bertujuan utama untuk mendukung atau terlibat aktif dalam berbagai aktifitas publik dan menekankan pada kerja pelayanan sosial tanpa berorientasi mencari keuntungan moneter atau komersil.

Pada dasarnya organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan organisasi yang berorientasi pada profit atau yang sering juga disebut dengan organisasi bisnis. Perbedaan yang mendasar terdapat pada bagaimana cara organisasi tersebut mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan operasinya. Organisasi nirlaba bersifat mandiri dalam segi pembiayaan dan pengelolaannya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Ada juga beberapa organisasi nirlaba yang menggunakan pendapatan dari jasa yang diberikan untuk mendanai kegiatan operasionalnya.

Saat ini tidak sedikit organisasi nirlaba membiayai sendiri kegiatan operasionalnya sebagai entitas yang akan senantiasa hidup dan beraktivitas (*going concern*) yang tidak jauh berbeda dengan entitas bisnis lainnya, namun tetap pada landasan utama yaitu kegiatan organisasi nirlaba tidak berorientasi terhadap laba. Entitas nirlaba yang seperti demikian sulit dibedakan dengan organisasi bisnis dikarenakan kegiatannya yang hampir sama. Hal ini berakibat pada pengukuran jumlah dan kepastian arus kas masuk yang menjadi ukuran penting bagi para pemakai dari laporan keuangan entitas tersebut, misalnya seperti donatur, kreditur maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. (Hendrawan, 2011).

Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa akan datang. Bagi tiap jenis-jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat kestabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih (Mardiasmo, 2009:33). Akuntansi sebagai sistem informasi sangatlah diperlukan untuk pengambilan keputusan dan menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan langkah yang harus diambil oleh sebuah entitas di masa mendatang. Keputusan yang telah diambil tidak hanya berpengaruh kepada kondisi keuangan yang ada di sebuah entitas, namun juga pihak-pihak yang berkepentingan dengan entitas tersebut. Salah satu bentuk konkrit yang dilakukan adalah dengan cara membenahi administrasinya

serta mempublikasi laporan keuangannya setiap periode. Maka dari itu, seperti halnya organisasi laba, organisasi nirlaba juga membutuhkan ilmu akuntansi guna memberikan suatu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan aturan atau standar yang telah ada.

Entitas nirlaba perlu memperhatikan laporan keuangannya yang berguna untuk menilai jasa yang diberikan kepada masyarakat, sejauh mana kemampuan organisasi tersebut memberikan jasa/layanan di masa mendatang serta bagaimana cara manajer melaksanakan tanggungjawabnya terhadap kinerja entitas nirlaba. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa dikomunikasikan didalam laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, aset neto dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut. Laporan posisi keuangan organisasi nirlaba disajikan terpisah seperti aset neto yang terikat dan tidak terikat penggunaannya. Pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para donatur disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas.

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar Akuntansi Keuangan memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam memilih metode maupun estimasi akuntansi yang dapat digunakan. Ikatan Akuntan Indonesia mewajibkan organisasi nirlaba menggunakan SAK sesuai badan hukum yang dimilikinya. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) Nomor 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba agar pelaporan pengelolaan dana baik kepada *stakeholder* ataupun pihak lainnya dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan daya banding yang tinggi. Di dalam PSAK No. 45 diatur mengenai bagaimana bentuk format dari laporan keuangan yang terdapat pada entitas nirlaba. Laporan keuangan berdasarkan PSAK No 45 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk dari entitas nirlaba. Hal ini digambarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam pasal 8 disebutkan bahwa PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin dari Menteri. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20 tertulis perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Maka dapat disimpulkan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Al-Fithrah Surabaya merupakan salah satu jenis perguruan tinggi yang ada dan diakui di Indonesia, dan karena STAI Al-Fithrah Surabaya dibawah naungan Yayasan Al-Khidmah Indonesia maka STAI Al-Fithrah Surabaya digolongkan menjadi perguruan tinggi swasta.

Sebagai entitas nirlaba maka sudah seharusnya pelaporan keuangan perguruan tinggi ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, dalam hal ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang

Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Pernyataan tersebut dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan STAI Al Fithrah Surabaya dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki sumber daya banding yang tinggi. Apabila perguruan tinggi ini telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45 yang akuntabilitas dan melaporkan kepada pemakai laporan keuangan tersebut, hal itu tidak menutup kemungkinan untuk membantu perguruan tinggi ini mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada entitas nirlaba STAI Al-Fithrah menurut PSAK No. 45 dan tertarik untuk membahasnya dalam laporan tugas akhir dengan judul : **Implementasi PSAK No. 45 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nirlaba STAI Al-Fithrah Surabaya.**

1.2. Tujuan Studi Lapang

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 45 dalam penyusunan laporan keuangan STAI Al-Fithrah.

1.3. Manfaat Studi Lapang

Manfaat pengamatan

Berikut ini manfaat pengamatan dibeberapa bidang:

1. Untuk Kepentingan Terapan

Hasil laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk ilmu terapan oleh mahasiswa yang memerlukan informasi data pada bidang akuntansi khususnya mengenai pelaporan entitas nirlaba.

2. Untuk Kepentingan Ilmiah

Diharapkan dengan laporan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menguji kemampuan penulis mengenai teori yang didapat dari pendidikan teoritis yang diperoleh di bangku perkuliahan dan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian atau studi perbandingan lebih lanjut mengenai pelaporan entitas nirlaba menurut PSAK No. 45.

1.4. Ruang Lingkup Studi Lapang

Penulis hanya akan membahas mengenai Penerapan PSAK No. 45 dalam penyusunan laporan keuangan periode 2017 pada entitas nirlaba STAI Al-Fithrah Surabaya.

1.5. Metode Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif, sebagaimana pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4) yang mengemukakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penyusunan laporan ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:

a) Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan seorang responden yang berhubungan langsung dengan proses penyusunan laporan keuangan. Wawancara yang akan dilakukan merupakan wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah Bagian keuangan / Akuntansi STAI Al Fithrah Surabaya.

Point-point pertanyaan didalam teknik wawancara ini meliputi:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada para Donatur dan penyumbang dana untuk organisasi?
2. Bagaimana siklus akuntansi yang terjadi didalam perguruan tinggi ini?
3. Dalam proses pencatatan, metode apa yang digunakan oleh perguruan tinggi ini?
4. Apa fungsi laporan keuangan yang diterbitkan oleh sekolah tinggi ini?
5. Siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan?
6. Apa kendala yang dialami dalam proses penyusunan laporan keuangan?
7. Dokumen apa saja yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan?

b) Dokumentasi

merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan mengkaji ulang data dan dokumen yang berhubungan dengan laporan keuangan sehingga diperoleh manfaat sebagai dasar pengujian data dan sekaligus langkah-langkah dalam menganalisa data. Dokumen-dokumen yang diperlukan antaranya : *Company profile*, Laporan keuangan periode 2017.